

KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Liberthin Palullungan

Universitas Kristen Indonesia Paulus, liberthin@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Keanggotaan Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup IBRD terkait fungsi dan kedudukannya bagi negara-negara anggotanya serta menggambarkan status dan peranan Indonesia sebagai anggota IBRD dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif atau doktrinal yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melainkan diperoleh melalui pihak lain yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku-buku terkait, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, karya tulis serta berbagai informasi yang didapatkan melalui internet dengan pendekatan konseptual dan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup Bank Dunia/IBRD tidak hanya terbatas fungsinya pada pemberian bantuan pinjaman finansial tetapi juga bantuan teknis terkait layanan konsultasi dan strategi melalui program pembangunan nasional. Sebagai anggota IBRD, Indonesia berstatus sebagai negara menengah kebawah yang sebelumnya merupakan negara menengah keatas berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) dan berstatus sebagai negara maju pada WHO yang memiliki pengaruh pada pembangunan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Bank Dunia, IBRD, Pembangunan Nasional

Abstract

Indonesia's membership in the International Bank for Reconstruction and Development is one step in realizing national development as the nation's ideals. This study aims to explain the scope of the IBRD related to its function and position for its member countries and to describe the status and role of Indonesia as a member of the IBRD in the context of realizing National Development. The research method used is normative or doctrinal research, which means this research is carried out using secondary data obtained indirectly but obtained through other parties, namely through library research in the form of related books, theses, journals, articles, works. writing and various information obtained through the internet with a conceptual approach and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the scope of the World Bank/IBRD is not only limited to its function in providing financial loan assistance but also technical assistance related to consulting services and strategies through national development programs. As a member of the IBRD, Indonesia has the status of a lower middle class country which was previously an upper middle class country based on Gross National Income (GNI) and has the status of a developed country in WHO which has an influence on Indonesia's national development.

Keywords: World Bank, IBRD, National Development

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan Pembangunan Nasional. Krisis ekonomi yang sempat terjadi di Indonesia dan pemulihan dari krisis ekonomi tersebut yang berlangsung lambat membuat Indonesia kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara maju. Persoalan utama terdapat pada pendapatan perkapita di Indonesia yang kurang memungkinkan untuk mendorong Indonesia segera sejajar dengan Negara-negara maju. Rendahnya pendapatan masyarakat dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak merupakan masalah yang menyebabkan kurangnya dana yang diperlukan sehingga pembangunan nasional dari berbagai sektor mengalami keterlambatan. Dalam pelaksanaan pembangunan suatu Negara seperti Negara berkembang, jika hanya mengandalkan pendapatan dari dalam negeri saja maka Negara tersebut akan terus mengalami keterlambatan pembangunan. Oleh karena itu, terdapat juga pembiayaan yang berasal dari luar negeri berupa pinjaman yang telah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Hal ini juga terjadi bagi Negara Indonesia dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terdapat neraca penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dalam negeri berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh melalui penerimaan SDA, bagian pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP lainnya. Penerimaan luar negeri tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan dan pinjaman dari luar negeri dilakukan dengan syarat yang lebih ringan dari yang berlaku di pasar Internasional.¹

Secara umum, penerimaan dari luar negeri menguntungkan kedua belah pihak baik itu pihak yang meminjamkan maupun pihak yang memperoleh pinjaman. Indonesia sebagai Negara berkembang yang menerima bantuan pinjaman dalam suatu forum kerja sama yang dikenal dengan IGGI (*Inter-Governmental Group On Indonesia*) pada tahun 1967 yang dihentikan pada tahun 1992 karena Belanda yang menggunakan forum tersebut untuk mengintimidasi Indonesia, lalu yang kemudian digantikan oleh CGI (*Consultative Group On Indonesia*) pada Juli 1992. Lembaga yang menjadi donor dalam forum CGI yaitu Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis dan Swiss. Lembaga Organisasi Internasional yang termasuk dalam CGI yaitu *Islamic Development Bank, Kuwait Fund, Bank Dunia (IBRD), Asian Development Bank, Nordic Investment Bank dan Saudi Fund*. Bank Dunia (IBRD) merupakan donor terbesar dalam CGI. ² Sebagai donor terbesar dalam CGI, keberadaan Bank Dunia memberikan peluang bagi Negara-negara anggota untuk

¹ Harri Baskoro Adiyanto, 2000, "Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional", Skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, hlm.5

² Ibid, hlm.12

mendapatkan bantuan berupa penyediaan dana dalam rangka pembangunan perekonomian Negara. Selain dalam hal finansial, Bank Dunia juga memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan lingkungan infrastruktur dan lain-lain.

Pada awal pemulihan krisis ekonomi dan politik yang terjadi, Indonesia memperoleh pinjaman dari lembaga IMF atau Dana Moneter Internasional yang kemudian dihentikan pada tahun 2003. IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga organisasi internasional yang memberikan pinjaman kepada Negara Negara berkembang. Kedua lembaga internasional tersebut didirikan di *Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat*. Pada dasarnya IMF memiliki tujuan untuk kemajuan kerjasama internasional di bidang keuangan dan perdagangan. IMF mendorong kerjasama moneter internasional untuk membantu negara-negara membangun dan memperkuat perekonomiannya serta membantu memberikan bantuan untuk merancang program kebijakan dalam mengatasi masalah neraca pembayaran. Sementara Bank Dunia pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada Negara-negara yang mengalami kerusakan akibat Perang Dunia II serta kepada Negara dalam rangka pembangunan. Keberadaan Bank Dunia mendorong pembangunan perekonomian yang berjangka panjang dalam menghindari kemiskinan dengan bantuan teknis dalam rangka reformasi pada sektor-sektor tertentu. Secara umum, kedua organisasi ini sama-sama memberikan pinjaman kepada suatu Negara. Kedua organisasi ini merupakan hasil konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Monetary and Financial Conference*) Perbedaannya yaitu, IMF memberi pinjaman dalam jangka pendek dan menengah yang dananya berasal dari kontribusi yang disediakan anggotanya sedangkan Bank Dunia memberi pinjaman dalam jangka panjang yang dananya diperoleh melalui kontribusi anggota dan penerbitan obligasi³. Salah satu organisasi internasional anggota Bank Dunia yaitu IBRD. Pada tanggal 15 April 1954, Indonesia masuk menjadi Negara anggota IBRD dan sempat mengundurkan diri pada 17 Agustus 1965 karena kondisi Politik. Kemudian dengan adanya pergantian pemerintah Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota IBRD pada September 1966.

Keberadaan Bank Dunia/IBRD dan IMF dalam memberikan berbagai program bantuan bagi Indonesia sebagai Negara anggotanya diharapkan mampu untuk mendorong pemulihan Indonesia dari berbagai krisis yang pernah terjadi, seperti krisis ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan serta krisis lainnya. Sehingga Indonesia dapat mewujudkan pembangunan nasional untuk mengejar

³Anonym, 2017, "IMF dan BANK DUNIA", Lembaran fakta, <https://www.imf.org/id/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 18.40 WITA

ketertinggalannya dari Negara-negara maju. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia hingga pada saat ini, Indonesia belum dapat berdiri sejajar dalam berbagai bidang dengan Negara-negara maju. Salah satunya adalah pendapatan perkapita serta sumber daya manusia yang belum sejahtera secara menyeluruh.

Peranan organisasi internasional dalam memberikan bantuan bagi suatu Negara merupakan hubungan hukum yang secara langsung terjadi antara Negara dengan organisasi internasional terkait. Hal ini termasuk dalam lingkup Hukum Internasional karena menyangkut mengenai subjek hukum yang tidak hanya melibatkan satu Negara saja melainkan juga melibatkan organisasi Internasional (antar Negara).

Keanggotaan Indonesia dalam Bank Dunia (IBRD) dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diulas lebih dalam. Secara sederhana, hubungan yang terjadi antara organisasi internasional dengan Negara Indonesia dalam hal memberikan bantuan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional memberikan gambaran bagaimana hal dalam lingkup "Internasional" dapat memberikan pengaruh bagi lingkup "nasional" begitupun sebaliknya. Akan tetapi, meskipun keanggotaan Indonesia dalam IBRD telah ditetapkan dalam UU No.5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, hal yang perlu menjadi perhatian yaitu bagaimana jika keberadaan Bank Dunia/IBRD tidak memberikan pengaruh secara merata kepada berbagai bidang di Indonesia, bagaimana jika terjadi hal-hal diluar kehendak Pemerintah Indonesia yang kemudian membuat IBRD tidak mencairkan pinjamannya serta bagaimana jika Indonesia tidak dapat melunasi pinjaman dari IBRD, apakah kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang dapat terjadi mengingat sebagian besar kebijaksanaan IBRD dipegang oleh Negara-negara besar dengan pengaruh yang besar pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi, kedudukan dan ruang lingkup IBRD pada Negara-negara anggotanya serta memberikan gambaran mengenai status dan peranan Indonesia sebagai anggota IBRD dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau doktrinal yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melainkan diperoleh melalui pihak lain yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku terkait, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, karya tulis serta berbagai informasi yang didapatkan melalui internet.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) berarti melakukan analisis dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya seperti lembaga hukum, sumber hukum dan sebagainya lalu kemudian mengidentifikasi dengan menganalisis data secara kualitatif yang bukan diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan melainkan tetapi lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam, menafsirkan data yang telah diperoleh, mereduksi data, menyajikan lalu kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil akhir.

3. Ruang Lingkup IBRD terkait Fungsi dan Kedudukannya bagi Negara Anggota

Pada Bank Dunia, negara merupakan tujuan implementasi dari tugas dan program yang dilakukan. Secara luas, ruang lingkup aktivitas IBRD tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman. IBRD juga melakukan pengkajian mengenai kondisi negara dalam berbagai bidang sektor kehidupan dalam rangka memberikan strategi bantuan yang layak bagi pembangunan nasional negara-negara anggotanya. Berbagai problematika ekonomi yang terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia mengharuskan Bank Dunia tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan sumber daya manusia, tetapi juga memperluas lingkup programnya melalui berbagai reformasi seperti reformasi pelayanan umum, manajemen perusahaan negara, perbaikan kualitas pendidikan dan keadilan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pembangunan sektor-sektor swasta, reformasi pendaftaran tanah dan pemberian hak atas tanah serta suatu proyek *good governance* dalam hal memperkuat pemerintahan diimbangi dengan desentralisasi dalam hal pengambilan keputusan dari pusat ke daerah dan juga menciptakan fungsi pemerintahan didasarkan pada wilayah perwalian.

Dalam membantu pembiayaan dan meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya, Bank Dunia membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek publik, memberi pinjaman dan menjamin pinjaman. Meskipun pada dasarnya Bank Dunia terkait pada kegiatan finansial, tetapi Bank Dunia juga dapat berfungsi sebagai pemberi layanan konsultasi dan memberikan produk manajemen risiko pada tingkat nasional dan subnasional. Pada kegiatan yang bersifat teknis, Bank Dunia juga berfungsi sebagai teknis, Bank Dunia juga berfungsi sebagai kendaraan untuk memberikan pengetahuan dan transfer dorongan keahlian di tiap proyek. Layanan konsultasi yang diberikan oleh Bank Dunia dapat membantu pemerintah, lembaga sektor resmi serta lembaga pembangunan dalam rangka membangun kapasitas kelembagaan untuk melindungi dan memperluas sumber daya keuangan. Bank Dunia memiliki fungsi dalam kehadirannya bagi negara-negara anggotanya. Fungsi Bank Dunia antara lain:

- a. Memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya dalam bentuk pembiayaan, program-program, layanan konsultasi, pengembangan dan lain-lain.
- b. Mengurangi kemiskinan melalui pembenahan pada berbagai sektor kehidupan
- c. Melestarikan lingkungan hidup
- d. Urut ambil bagian dalam rangka membentuk stabilitas ekonomi dalam hal investasi dan perencanaan jangka panjang
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat negara-negara anggotanya
- f. Memberikan bantuan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan transparan
- g. Memberikan dukungan bagi pengembangan sektor swasta
- h. Memperbaiki makroekonomi dan mikroekonomi negara.

Dalam hal kedudukan, Bank Dunia/IBRD berada pada tingkat lembaga keuangan internasional terbesar sebagai donor juga sebagai pemberi layanan konsultasi melalui program-program. Bank Dunia menjadi sasaran utama bagi negara-negara termasuk negara naggotanya untuk memperoleh bantuan pinjaman liar negeri yang tidak hanya berpusat pada bantuan finansial tetapi juga teknis Pelaksanaan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Bank Dunia, meskipun terus memperoleh bantuan Bank Dunia tetapi pada dasarnya Indonesia juga memberikan modal kepada Bank Dunia. Selama 2 (dua) periode Indonesia suatu kesempatan untuk dapat menempatkan wakilnya sebagai salah seorang Direktur Eksekutif Bank Dunia di Washington D.C. Jabatan Direktur Eksekutif disertai pula dengan jabatan Direktur Eksekutif pengganti. Kedua jabatan ini untuk wilayah Asia Tenggara ditentukan melalui rotasi. Pada periode I (1 November 1996 - 31 Oktober 1998) Direktur Eksekutifnya adalah Indonesia dan Direktur Eksekutif penggantinya adalah Thailand. Pada periode II (1 November 1998- 31 Desember 2000) Direktur Eksekutif adalah Indonesia dan Direktur Eksekutif Pengganti adalah Malaysia. Jabatan Gubernur (Governor) dan Gubernur Pengganti (Alternate Guvernor) IBRD tnuk negara Indonesia sendiri yaitu Menteri Keuangan dan Deputy Gubernur Bank Indonesia.⁴

⁴ Anonim, 2001, "International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)", <http://www.klndepkeu.tripod.com/biro/bagian/bag3/3subag2/doc/2001/11/ibrd.pdf> diakses tanggal 13 Juli 2022

4. Status dan Peranan Indonesia Sebagai Anggota IBRD dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional

Indonesia merupakan salah satu Negara berstatus Negara berpenghasilan menengah ke atas. Bank Dunia dalam hal ini IBRD menaikkan status Indonesia yang awalnya berstatus *lower middleincome country* menjadi *upper middleincome country* mulai tanggal 1 Juli 2020. IBRD menaikkan status Indonesia berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (*Gross National Income*) perkapita Indonesia pada tahun 2019 yang sebelumnya US\$3.840 menjadi US\$4.050. Pendapatan Nasional Bruto (GNI) merupakan nilai hasil seluruh produk barang atau jasa oleh suatu negara yang diukur dengan satuan uang. Kenaikan status Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan persepsi investor dan mitra dagang. Bank Dunia mengkategorikan Negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) perkapita⁵.

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh berbagai Negara-negara dunia termasuk Indonesia memberikan dampak bagi status Indonesia sebagai anggota IBRD. Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Negara berpenghasilan menengah ke atas kembali turun menjadi Negara berstatus menengah ke bawah akibat dampak Covid-19. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia pada tahun 2021 sebesar US\$4.140 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 tertinggi di Asia Tenggara setelah Singapura dengan GNI per kapita US\$64.010, Malaysia dengan GNI per kapita US\$10.930 dan Thailand dengan GNI per kapita US\$7.260. Kemudian setelah Indonesia, yaitu Filipina dengan GNI per kapita US\$3.640, Vietnam dengan GNI per kapita US\$3.560 dan diurutan paling terakhir yaitu Myanmar dengan GNI per kapita US\$1.140. Berdasarkan hal tersebut, Bank Dunia mengkategorikan negara-negara Asia Tenggara sebagai dengan status menengah ke bawah karena GNI per kapitanya berada pada kisaran US\$1.086 hingga US\$4.255⁶.

Setiap lembaga keuangan nasional memiliki pandangan atau kategori yang berbeda mengenai status suatu Negara. Pada tahun 2022 ini, Indonesia dicoret dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat dan masuk menjadi kategori dengan status negara maju pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia merupakan Negara yang terletak diantara 2 (dua) benua yaitu benua Australia dan Benua Asia serta diantara 2 (dua) samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak Negara Indonesia ini merupakan letak negara yang strategis dalam hal

⁵ Dian Kurinati, 2020. *Bank Dunia Naikkan Status Indonesia Jadi Upper Middle Income Country*. <https://news.ddtc.co.id/bank-dunia-naikkan-status-indonesia-jadi-upper-middle-income-country-22025> tanggal 10 Juli 2022

⁶ Devina Halim, 2021. *Bank Dunia tetapkan Indonesia kategori negara berpendapatan menengah bawah, Status Indonesia turun dari sebelumnya yang masuk sebagai kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income)*. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-dunia-tetapkan-indonesia-kategori-negara-berpendapatan-menengah-bawah/2296776> . tanggal 11 Juli 2022

jalur perdagangan dunia. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki pendapatan pasar sekitar 0,5% dari seluruh total perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga ikut dan menjadi tuan rumah dalam G20 atau *Group of Twenty* yang merupakan sebuah forum kerjasama dalam bidang ekonomi internasional yang memiliki anggota negara-negara yang memiliki ekonomi besar. Maka dari itu Indonesia masuk dalam kategori negara maju. Indonesia dianggap sebagai negara dengan *emerging economy* yang berpotensi besar di Asia. Masuknya Indonesia sebagai anggota G20 memberikan manfaat bagi Indonesia salah satunya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. G20 memiliki tujuan utama dalam hal stabilitas keuangan nasional dalam hal meningkatkan perekonomian negara.

IBRD merupakan donor terbesar sekaligus ketua sidang dalam forum CGI yang memiliki peran penting dalam penyaluran pinjaman luar negeri. Selain itu, IBRD memberikan pinjaman yang besar bagi Indonesia dengan menyertakan konsultasi atau nasihat-nasihat dalam rangka pembangunan nasional Indonesia. IBRD juga member gambaran kepada negara-negara donor agar mengetahui kondisi Indonesia dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Sebaliknya, sebagai anggota IBRD, Indonesia memiliki peranan yang penting. Meskipun iuran yang diberikan oleh Indonesia tergolong kecil sekitar 0,96% dari seluruh total iuran, tetapi hal tersebut tidak dapat menjadikan peranan Indonesia sebagai anggota IBRD memiliki posisi yang kecil juga dalam dunia Internasional.

Pada dasarnya, Bank Dunia/IBRD merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama sebagai pemberi pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki dan mewujudkan pembangunan nasional. Selain menyediakan pendanaan, IBRD juga berperan dalam memberikan konsultasi bagi negara-negara berkembang. Awalnya Indonesia belum banyak memanfaatkan bantuan dari IBRD dan IBRD juga belum banyak memberikan perhatian bagi Indonesia. Dalam hal perencanaan ekonomi, Indonesia memiliki rencana untuk memperoleh bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Pada awal keanggotaannya, Indonesia yang mengalami krisis memusatkan perhatiannya untuk memperoleh bantuan luar negeri yang bersifat bilateral sehingga IBRD belum aktif memberikan bantuan kepada Indonesia baik itu dalam hal pendanaan maupun konsultasi bantuan program-program. Di samping itu Indonesia juga belum menunjukkan perannya sebagai anggota IBRD. Oleh karena itu, Indonesia menganggap keanggotaannya pada IBRD tidak memberikan dampak atau manfaat bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.

IBRD tidak hanya memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. IBRD memberikan dukungan teknik dan analisis bagi program-program reformasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui *Analytical and Advisory Activities (AAA)* yang didanai oleh Bank Dunia dan negara-negara lain sebagai donor. Salah satu program

pembangunan nasional Indonesia yang dikelola oleh IBRD yaitu mengumpulkan hibah dari Bank ataupun dari negara-negara donor berupa Dana Perwalian. Salah satu contohnya yaitu rekonstruksi di Aceh dan Nias melalui Dana Perwalian yang dikelola IBRD. Sisa dari hibah tersebut juga digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan, dukungan desentralisasi serta air bersih.

Sebagai lembaga keuangan internasional yang juga memberikan program bantuan secara teknis, IBRD telah membuat dan menjalankan program-program di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu program IBRD yaitu program pengetasan kemiskinan dimana IBRD mengimplementasikan program dengan menjamin kesehatan ibu anak dan pendidikan secara universal. Program ini telah dilakukan pada tahun 2000. Pada program ini, IBRD membantu dalam permasalahan nutrisi, imunisasi dan kebutuhan lain untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Program lain yang dijalankan oleh IBRD pada tahun 2006 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program lain yang didukung oleh IBRD yaitu program penyediaan air bersih dan layanan sanitasi, program reformasi guru, program Keluarga Harapan serta program rehabilitasi pemukiman masyarakat dalam rangka memberikan hunian yang layak bagi warga masyarakat negara Indonesia.

Sejumlah program pembangunan yang telah dijalankan oleh Bank Dunia/IBRD merupakan bantuan bagi negara Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional termasuk dalam pembangunan nasional. Pada saat ini, dampak Covid-19 di berbagai Negara memberikan pengaruh pada perekonomian suatu Negara termasuk Indonesia. Bank Dunia memberikan peranan dalam hal dukungan pembiayaan kepada Indonesia melalui program Indonesia Covid-19 *Emergency Response* senilai sekitar Rp.3,62 Triliun. Dana bantuan ini digunakan dalam rangka mendukung Negara Indonesia untuk mengurangi resiko penularan atau penyebaran dan berbagai tindakan lainnya.

5. Kesimpulan

Ruang lingkup Bank Dunia/IBRD tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan sumber daya manusia tetapi juga mengkaji mengenai kondisi negara pada berbagai sektor dalam rangka memberikan strategi bantuan bagi aktivitas pembangunan nasional suatu negara. Dalam hal fungsi dan kedudukan, Bank Dunia tidak hanya melaksanakan kegiatan finansial tetapi juga berfungsi dalam memberikan layanan konsultasi terkait manajemen risiko dan pada kegiatan teknis, Bank Dunia berfungsi sebagai kendaraan untuk memberikan pengetahuan dan transfer dorongan keahlian di tiap proyek dalam menjalankan program-programnya dalam rangka mendukung pembangunan nasional pada negara anggotanya. Berdasarkan Pendapatan Nasional

Bruto (*Gross National Income-GNI*), status Indonesia sempat naik menjadi negara menengah ke atas (*upper middle income*) yang kemudian kembali turun menjadi menengah ke bawah (*lower middle income*) akibat pandemi covid 19. Pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Indonesia telah berstatus sebagai negara maju karena dianggap sebagai negara dengan *emerging economy* yang berpotensi besar di Asia.

Referensi

Buku:

- Johan Syahperi Saleh, 1984. *Hubungan dan Kerjasama Ekonomi Internasional : Perspektif dan Permasalahannya*, Pusat Studi Hukum UNPAR, Bandung.
- Leviza Jelly. 2009. *Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internaisonal*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Mohammad Ali. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Intima, PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Dr. Adi Budiarmo. FCPA (Aus). 2019. *Kerjasama Multilateral Indonesia di Sektor Keuangan*. PT Penerbit IPB Press. Bogor
- Bowett D.W, *Hukum Organisasi Internasional (The Law of International Institutional)*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja.Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Kusuaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I-Bagian Umum. Cet.7. Bandung:Banicipta,1990
- A.Halim Iskandar. 2020. *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Jakarta

Skripsi:

- Harri Baskoro Adiyanto, 2000, "Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional", Skripsi, sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila
- D. Tri Wahyuni, 2010, "*Pembangunan Nasional*" Universitas Komputer Indonesia

Jurnal:

- Haryo Aswicahyono, David Christian, 2017, "*Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*", *CISC Working Paper series, Centre for Strategic and International Studies*. Agustus 2017.
- Suryati Hasan, "*SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PENATAAN HUKUM NASIONAL (Suatu Kajian terhadap Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)*", Stia Al Gazali Barru. November 2018
- Ahmad Helmy Fuady, "*Perencanaan Pembangunan di Indoensia Pasca Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat*", Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, 25 Juli 2013

Website:

- Anonym, 2017, "IMF dan BANK DUNIA", Lembaran fakta, <https://www.imf.org/id/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 18.40 WITA
- Anonim, 2001, "International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)", <http://www.klndepkeu.tripod.com/biro/bagian/bag3/3subag2/doc/2001/11/ibrd.pdf> diakses tanggal 13 Juli 2022
- Dian Kurinati, 2020. *Bank Dunia Naikkan Status Indonesia Jadi Upper Middle Income Country*. <https://news.ddtc.co.id/bank-dunia-naikkan-status-indonesia-jadi-upper-middle-income-country-22025> tanggal 10 Juli 2022
- Devina Halim. 2021. *Bank Dunia tetapkan Indonesia kategori negara berpendapatan menengah bawah, Status Indonesia turun dari sebelumnya yang masuk sebagai kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income)*. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-dunia-tetapkan-indonesia-kategori-negara-berpendapatan-menengah-bawah/2296776> . tanggal 11 Juli 2022